

# 2022



IPB University  
— Bogor Indonesia —

Departemen Sains  
Komunikasi dan  
Pengembangan Masyarakat

# Policy Brief

Komunikasi Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat, Tata  
Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

## PENYULUHAN BERPERSPEKTIF GENDER DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA

Dyah Retna Puspita\*

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat  
Fakultas Ekologi Manusia, IPB email: [dyahretna@apps.ipb.ac.id](mailto:dyahretna@apps.ipb.ac.id)

### Isu Kunci

- Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kasus KDRT dan perceraian di banyak wilayah di mana kebanyakan korbannya adalah perempuan/istri dan anak.
- Penyuluhan ketahanan keluarga hingga saat ini masih belum berperspektif gender.
- Diperlukan strategi penyuluhan berperspektif gender agar lebih sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki.

### Ringkasan

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan fenomena KDRT dan perceraian di banyak wilayah. Hal ini perlu dicegah agar kasusnya tidak meluas, karena dampak negatifnya yang multidimensi, tidak saja bagi keluarga tersebut (terutama anak), melainkan juga masyarakat dan bahkan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu dikaji pelaksanaan penyuluhan ketahanan keluarga yang dilakukan selama ini. Ditengarai, salah satu penyebabnya adalah karena belum digunakannya perspektif gender dalam proses penyuluhannya. Untuk itu, tulisan ini menggagas strategi penyuluhan baru yang lebih responsif gender agar dapat mengatasi permasalahan dan kebutuhan baik di kalangan perempuan/istri maupun laki-laki/suami.



Departemen SKPM –  
FEMA IPB, Wing 1 – Level  
5, Jalan Kamper,  
Kampus IPB Darmaga  
Bogor, Jawa Barat



+62-251-8627793



[Skpm@apps.ipb.ac.id](mailto:Skpm@apps.ipb.ac.id)

## Pendahuluan

Penyuluhan ketahanan keluarga menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka membentuk keluarga berkualitas sebagaimana diamanahkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Semakin berkualitas keluarga, akan semakin kuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang kuat akan meningkatkan ketahanan masyarakat karena keluarga adalah inti dari masyarakat.

Peningkatan kualitas keluarga menjadi penting karena keluarga memiliki sejumlah fungsi strategis. Keluarga berperan dalam pembentukan keterampilan-keterampilan unggul (*mega skills*) dan kebajikan-kebajikan moral (Rich, 1997 dan Popov dkk. 1997) dan ikut menciptakan modal sosial (*social capital*) (Fukuyama, 1999).

Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 telah menurunkan ketahanan keluarga di sebagian besar wilayah yang antara lain tampak dari tinggi dan meningkatnya kasus perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2021 jumlahnya 447.743 kasus, meningkat 53,50 persen dibandingkan tahun 2020 (291.677 kasus). Kasus terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 98.088 kasus di mana sebagian besarnya (74.117 kasus) adalah cerai gugat (Caritau. 21 September 2022). Di Provinsi Jawa Barat, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Indramayu (8.026 kasus). Kabupaten Bogor menempati urutan keempat dengan 6.524 kasus (Databox, 26 Juli 2022).

Fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius, karena dampak negatifnya yang multidimensi. Perceraian tidak saja melukai semua pihak yang terlibat (terutama anak-anak), melainkan juga masyarakat dan bahkan Pemerintah daerah setempat (Fagan dan Rector, 2000). Salah satu dampaknya bagi Pemerintah adalah tambahan beban kerja pengurusan perubahan status warga di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Puspita, dkk., 2016). Perceraian meningkatkan kerentanan ekonomi keluarga tersebut dan masyarakat (Smock *et al.*, 1999) dan membuat

standar hidup perempuan turun hingga sekitar 30 persen, sedangkan bagi laki-laki turun sekitar 10 persen (Hoffman & Duncan, 1995).

Agar fenomenanya tidak semakin meluas, perlu penggiatan kegiatan penyuluhannya. Namun, hasil kajian Puspita, dkk. (2019) menunjukkan bahwa salah satu penyebab tingginya kasus perceraian adalah karena penyuluhannya belum berperspektif gender. Untuk itulah, makalah ini bertujuan: (1) mendeskripsikan penyuluhan ketahanan keluarga berperspektif gender dan (2) menggagas strategi penyuluhannya pasca pandemic Covid-19.

## Pembahasan

### 1. Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berperspektif Gender

Asngari (2001) mendefinisikan penyuluhan sebagai kegiatan mendidik orang (kegiatan pendidikan) dengan tujuan mengubah perilaku klien sesuai dengan yang direncanakan/dikehendaki yakni orang yang makin modern. Adapun Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisikmateril guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin (UU Nomor 52 tahun 2009). Beberapa kajian tentang penyuluhan di bidang keluarga telah menemukan pentingnya peran tersebut, misalnya dalam meningkatkan pengetahuan suami istri tentang alat kontrasepsi (Vural *et al.*, 1999) dan reproduksi sehat (Utsman, 2002).

Sementara itu, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014). Jadi, gender berbeda dengan jenis kelamin, karena sifatnya yang dinamis yakni dapat berbeda antara-tempat dan antar-waktu.

Penyuluhan perlu mempertimbangkan perspektif gender disebabkan sejumlah faktor. BKKBN menyebut hal ini dengan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) yang responsive gender. KIE adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam rangka meningkatkan dan memanfaatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, dan mendorongnya agar secara sadar menerima program KB (Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan - BKKBN, 2007). Jadi, KIE responsif gender adalah salah satu pendekatan dalam komunikasi yang bertujuan mempercepat perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku. Ini diukur dari berbagai saluran komunikasi, di mana penyampaian dan penerimaan pesannya memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah:

- (1) mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, keluarga dan masyarakat agar mempunyai pemahaman tentang adanya kepentingan antara laki-laki dan perempuan;
- (2) mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender,
- (3) mengurangi atau menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender yang berkembang di masyarakat, dan mendorong tersusunnya kebijakan/program/peraturan yang responsif gender.

Perlunya memperhatikan isu gender dalam penyuluhan ketahanan keluarga disebabkan perbedaan gender seringkali menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*), terutama terhadap kaum perempuan, baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat, kultur, maupun negara yang termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*) dan beban ganda (*double burden*) (Fakih, 2001). Jadi, penyuluhan ketahanan keluarga berperspektif/gender adalah proses pendidikan non-formal yang bertujuan memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender dari kelompok sasaran, yakni suami dan istri agar menjamin tidak munculnya ketidakadilan gender dalam rumah tangga.

Kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui

kebutuhan pasar, akan tetapi tidak mengubah posisi perempuan yang subordinat. Adapun kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan gender agar perempuan dan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan. Contoh kegiatannya adalah perubahan dalam pembagian kerja gender, perbaikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, perlindungan hukum dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja wanita (Astuti, 2002).

## 2. Strategi Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berperspektif Gender

Tiga faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di banyak daerah adalah: masalah ekonomi, ketidaktanggungjawaban pasangan serta ketidakharmonisan/cekcok terus-menerus. Untuk itulah, penyuluhannya perlu berorientasi pada upaya memecahkan permasalahan ini.

Dalam kenyataannya, penyuluhan ketahanan keluarga (terutama penyuluhan KB) selama ini belum berperspektif gender. Hal ini tampak dari sasaran penyuluhannya yang sangat dominan hanya pada kaum perempuan/istri serta materi penyuluhannya yang masih berorientasi jangka pendek dan tidak sampai mengarahkan kepada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga. Akibatnya, kebutuhan praktis dan strategis gender laki-laki tidak pernah diperhatikan. Untuk itulah diperlukan penajaman strategi penyuluhannya berupa:

1. Perluasan sasaran penyuluhannya, tidak saja bagi kaum perempuan/istri, melainkan juga kaum laki-laki/suami dan bahkan remaja (putra dan putri).
2. Penajaman target penyuluhannya yang tidak saja berorientasi pada kebutuhan praktis jangka pendek, melainkan juga keputusan strategis (jangka panjang) yakni terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di kalangan perempuan/istri dan laki-laki/suami.
3. Perluasan jejaring kerja di antara para penyuluh ketahanan keluarga dengan para penyuluh di bidang-bidang lainnya seperti penyuluh agama dan penyuluh/pekerja sosial penyuluh pertanian.

4. Perluasan jejaring kerja antara para penyuluh ketahanan keluarga dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

## Implikasi dan Rekomendasi

Penajaman perspektif gender dalam penyuluhan ketahanan keluarga ini perlu disosialisasikan baik di kalangan para penyuluh formal (berstatus Aparatur Sipil Negara/ASN) maupun non formal seperti kader-kader PKK yang ada hingga di tingkat Rukun Tetangga/RT. Bahkan, para penyuluh non-formal inilah yang harus lebih diberikan pembekalannya, karena sebenarnya merekalah yang lebih paham permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki di wilayah mereka.

## Daftar Pustaka

- Asngari PS. 2001. *Peranan Agen Pembaharuan/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agrobisnis*. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. 15 September 2001. Bogor: IPB Press.
- Caritau. 21 September 2022. Daftar 10 Provinsi dengan Tingkat Perceraian Tertinggi di Indonesia, Jawa Barat di Posisi Pertama. <https://caritau.com> [diakses 29 Desember 2022].
- Databox. 26 Juli 2022. 10 Wilayah dengan Kasus Perceraian Tertinggi di Jawa Barat. <https://databoks.katadata.co.id/>.
- Fagan, Patrick F and Robert Rector. 2000. *The Effect of Divorce on America*. The Heritage Foundation: June 5, 2000. <http://www.heritage.org/marriage-and-family/report/the-effects-divorce-america>.
- Fakih, Mansour. 1995. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2014. Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan - BKKBN, 2007.
- Popov LK, D. Popov dan J. Kavelin. 1997. *The Family Virtues Guide: Simple Ways to Bring Out the Best in Our Children and Ourselves*. New York: A Plume Book.
- Puspita, Dyah Retna; Pawrtha Dharma, Rukna Idanati. 2016. Model Optimalisasi Peran Ketua Rukun Tetangga dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (MKP)*. <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/MKP/article/view/2598>. FISIP Universitas Airlangga.
- Puspita, D. R., Wahyuningrat, W., Dharma, P., & Isna, A. (2019). Pengembangan Kapasitas Penyuluhan Berbasis Masyarakat Berperspektif Gender dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. *Dinamika Journal: Pengabdian Masyarakat*, 1(4).
- Rich D. 1997. *MegaSkills: Building Children's Achievement for the Information Age*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Utsman. 1995. Penjajakan Kebutuhan KIE-KB untuk Peningkatan MKE di Daerah Proyek DES Sumatera Selatan. BKKBN Sumatera Selatan.
- Vural BF, Vural, J. Diker dan I. Yucesoy. 1999. Factors Affecting Contraceptive Use and Behavior in Kocaeli, Turkey. *Journal "Advance in Contraceptive"*. Volume 15, Number 4/ December, 1999. ISSN: 0267-4874. <http://www.springerlink.com/content/g711165118413702/>. [28 Mei 2010].